

Menghadapi Keragaman di Indonesia Melalui Konsep Masyarakat Interkultural

Stephanus Djunatan^{1*}

¹ Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Parahyangan; stephanus.djunatan@unpar.ac.id

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords:

Multiculturalism;
Interculturalism;
Plural Society.

Article history:

Received 2021-10-18
Revised 2022-02-22
Accepted 2022-02-22

ABSTRACT

This article examines the idea of interculturalism and its urgency in a plural society like Indonesia. The diversity of cultures, ethnicities and religions in Indonesia has led to horizontal conflicts in the past. The method used to write this article is qualitative through literature review data collection. This article argues that the idea of an intercultural society is a solution to the problems of modern life that prioritizes identical subject-object relations in European societies. In the Indonesian context, the idea of intercultural society is also very relevant to be applied in the midst of diversity. Hopefully, through this concept, Indonesia will avoid various conflicts and threats of disintegration.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji tentang gagasan interkulturalisme dan urgensinya dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Keragaman budaya, suku, dan agama di Indonesia yang telah memunculkan konflik horizontal di masa lalu. Metode yang digunakan untuk penulisan artikel ini ialah kualitatif melalui pengumpulan data kajian literatur. Artikel ini berargumen bahwa gagasan masyarakat interkultural merupakan solusi atas problematika kehidupan modern yang mengutamakan relasi subjek-objek yang identik pada masyarakat Eropa. Dalam konteks Indonesia, gagasan masyarakat interkultural juga sangat relevan diterapkan di tengah keragaman tadi. Harapannya, melalui konsep ini, Indonesia terhindar dari ragam konflik dan ancaman disintegrasi.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Masyarakat modern tidak dapat dipisahkan dari argumen Kantian dan Hegelian mengenai struktur negara, khususnya dalam konteks Jerman. Filsafat Kantian menyoroti pentingnya kemampuan individu (keberanian) untuk menggunakan akal budi (*Sapere Aude*) guna mengendalikan nasibnya sendiri, terlepas dari pengaruh luar seperti kekuasaan monarki dan ilahi. Masyarakat yang telah diberi pencerahan (*enlightened society*) tidak bergantung pada aristokrasi atau pemuka agama dalam menentukan kesejahteraan dan keamanan, seperti yang diungkapkan oleh Kant pada bulan September 1784.

Filsafat Hegelian melanjutkan konsep Kantian dengan menekankan signifikansi ikatan sosial yang berasal dari dinamika Roh Bangsa (*Volkgeist*) dan manifestasinya dalam ranah publik. Fondasi rohaniah tersebut menjadi parameter bagi kemajuan suatu bangsa atau masyarakat yang mengalami emansipasi. Dengan kata lain, ukuran spiritualitas ini terletak pada kapasitas kolektif yang rasional (atau masyarakat sipil) untuk mengatur dirinya sendiri (takdirnya) dan sepakat mengenai pedoman spiritual bersama yang dikenal sebagai konstitusi, seperti yang diuraikan oleh Avineri pada tahun 1974 (Avineri, 1974).

Idealitas masyarakat yang tercerahkan dan mandiri ini tak dapat dilepaskan dari peran ekonomi. Keberhasilan dan keamanan masyarakat menjadi jelas dan konkret ketika mereka mencapai kemajuan dan pertumbuhan dalam sektor ekonomi. Dengan kata lain, terwujudnya masyarakat modern sangat bergantung pada kemajuan dan perkembangan ekonomi. Pentingnya investasi, produksi, distribusi, dan konsumsi menjadi elemen kunci dalam mewujudkan 'kesejahteraan dan keamanan' yang nyata di dunia ini. Bahkan, dikemukakan bahwa keamanan di dunia ini mencerminkan keamanan di kehidupan setelah mati. Setidaknya, hal tersebut terimplikasikan dalam pemikiran Max Weber (Weber, 1992).

Masyarakat modern yang didasarkan pada kemampuan emansipatif individu dan komunal dapat dianggap berkolaborasi erat dengan sistem kapitalisme (Viktorahadi, 2022). Jika kemampuan emansipatif ini diartikan sebagai 'demokrasi', maka demokrasi dan kapitalisme bisa dianggap sebagai dua aspek yang tak terpisahkan, mirip dengan dua sisi mata uang yang sama. Bahkan, dapat dikemukakan bahwa tanpa adanya kapitalisme, kemungkinan besar masyarakat demokratis tidak akan terwujud. Keterkaitan kuat antara kekuatan politik dan ekonomi membuat masyarakat modern sebagai suatu bentuk ideologis menjadi sangat kuat dan sulit untuk diatasi. Terlebih lagi, hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa hubungan antara kekuatan politik dan sistem ekonomi komunisme telah mengalami kegagalan atau berupaya mencari bentuk 'varian' baru (seperti yang terjadi di USSR dan RRC).

Sejak lama, kritik telah disampaikan terhadap hubungan politik dan ekonomi yang rapat. Sekolah Frankfurt, sejak abad lalu, secara konsisten mengungkapkan berbagai kekurangan dan kekacauan dalam pernikahan kedua kekuatan ini. Salah satu kritik yang tak terlupakan dari Habermas menyoroti urgensi akses terhadap ruang publik. Ruang publik di sini tidak hanya merujuk pada area terbuka yang hijau, tempat masyarakat berkumpul santai. Sebaliknya, ruang publik menjadi tempat di mana berbagai diskursus dapat berinteraksi dalam dialektika negatif, suatu proses dialektika yang menolak untuk mencapai sintesis yang mengarah pada penormalan pola pikir dan gaya hidup tertentu (Adorno, 1973). Dengan kata lain, ruang publik menjadi wilayah untuk pemikiran kritis yang mengupas kesadaran, mengungkap motivasi yang dangkal—yang berfokus pada keuntungan pribadi daripada kepentingan bersama—serta mengungkap area gelap ketidaksadaran yang sering menjadi 'pendorong' bagi tindakan rasional.

Habermas menekankan pentingnya akses ke ruang publik, di mana dinamika 'Roh Zaman' menjadi pendorong utama emansipasi bagi setiap individu. Menurutnya, Roh Zamanlah yang menggerakkan proses emansipasi, bukan kekuatan politik dan ekonomi (Johnson, 2006). Ketika dinamika roh emansipatif ini terbatas dalam realitas, terkekang oleh kepentingan modal dan politik (seperti kolaborasi antara pemerintah kota Bandung dan pengusaha swasta dalam pengelolaan hutan kota Babakan Siliwangi), Roh Zaman mendorong individu dan komunitas yang memiliki pencerahan dan emansipatif ke ranah virtual. Oleh karena itu, kehadiran media virtual dianggap sebagai tanda perlawanan terhadap privatisasi dan hegemoni ruang publik.

Habermas juga menekankan betapa vitalnya interaksi diskursus di ruang publik, yang membuat masyarakat modern menjadi panggung untuk rasionalitas kritis yang mendorong cita-cita emansipasi dan pencerahan.

Kritik terhadap masyarakat modern dilanjutkan oleh filsuf Italia Antonio Negri. Bersama filsuf Inggris Michael Hardt, Negri mengusulkan bentuk masyarakat emansipatif yang disebut sebagai *multitude* (Hardt & Negri, 2004). Menurut keduanya, masyarakat pasca-modern meninggalkan bentuk negara bangsa tunggal (dalam kerangka demokrasi dan kapitalisme) dan beralih ke bentuk masyarakat

yang mengintensifkan dan melebarkan keragaman serta keberagaman. Roh Zaman yang emansipatif tidak dapat terkekang dalam bentuk negara-bangsa tunggal dan hegemonik. Gerakan pencerahan dan emansipasi semakin nyata ketika keberagaman atau keragaman individu dan komunitas menjadi pendorong perkembangan masyarakat. Negri dan Hardt merumuskan kemajemukan sebagai "*kemajemukan yang tidak dapat direduksi; perbedaan-perbedaan sosial tunggal yang membentuk kemajemukan itu harus selalu diungkapkan dan jangan pernah diratakan menjadi sesuatu, kesatuan, identitas, atau ketidakpedulian. Ini adalah definisi dari orang banyak yang kita mulai dari atas: singularitas yang bertindak bersama*" (Hardt & Negri, 2004, p. 105).

Definisi 'multitude' di atas memiliki dua aspek krusial. Pertama, konsep 'keberagaman' ini terdiri dari individu-individu atau komunitas-komunitas yang memiliki inisiatif atau singularitas. Individu dan komunitas ini tidak hanya bergerak berdasarkan kepentingan pribadi, keuntungan kelompoknya, atau diri sendiri. Mereka 'bertindak dalam kesetaraan' atau melakukan tindakan berbagi atau berpartisipasi bersama. Konsep 'bertindak dalam kesetaraan' dapat diartikan sebagai upaya untuk saling berbagi atau berpartisipasi dalam kepentingan bersama. Masyarakat modern yang diklaim dibangun di atas partisipasi aktif individu tidak memasukkan unsur 'berbagi' kepentingan. Sistem ekonomi kapital menghambat praktik berbagi karena dianggap melemahkan daya saing dalam persaingan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan. Penguatan konsep multitude menunjukkan bahwa tindakan berbagi atau berpartisipasi sama pentingnya dengan partisipasi aktif individu dan komunitas dalam berbagai aspek kehidupan. Faktanya, berbagi atau berpartisipasi secara alami merupakan kemampuan dan fungsi dasar manusia yang tidak boleh diabaikan, terutama berdasarkan pandangan Nussbaum (2007) dan A. K. Sen (1997) (Nussbaum, 2007; A. K. Sen, 1997).

Tindakan berbagi atau berpartisipasi tidak memerlukan regulasi dari entitas politik otoriter, sebagaimana yang dilakukan oleh negara komunis. Individu dan komunitas yang setara dapat berbagi kepentingan untuk mencapai 'commonwealth' atau kesejahteraan bersama. Uniknya, Negri dan Hardt menegaskan bahwa tindakan berbagi mengacu pada kehidupan itu sendiri. Kehidupan pada dasarnya mengandung beragam aspek dan tidak dapat disederhanakan menjadi suatu kesatuan tunggal. Perspektif ontologis ini juga mengimplikasikan bahwa kehidupan tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan kepentingan penguasaan dan eksploitasi. Aspek-aspek beragam dari kehidupan tidak dapat ditempatkan dalam klasifikasi dikotomik, yang pada saat yang sama juga menciptakan oposisi polar dan bahkan kontradiktif. Artinya, kehidupan tidak dapat dipisahkan dalam dikotomi subjek dan objek. Subjek dalam konteks ini adalah manusia atau secara sempit 'aku' (ego), sementara objek (dunia, the other, liyan) berada di luar manusia. Subjek adalah pihak yang mengetahui (cogito).

Dalam terminologi Foucault, mengetahui sering dikaitkan dengan menguasai, meskipun pengertian ini memiliki kontradiksi, di mana satu sisi terminologi subjek menunjukkan ketergantungan individu di bawah kekuasaan yang lebih otoriter, sedangkan di sisi lain subjek adalah individu yang berusaha menguasai Liyan, termasuk kekuasaan otoriter (Foucault, 1994, Oedipus Complex versi I Lacan). Oleh karena itu, subjek menguasai objek dan menguasainya untuk kepentingan (keberadaan) dirinya (ergo sum). Dikotomi subjek-objek ini kemudian diisi dengan pihak yang menguasai dan mengeksploitasi, serta pihak yang dikuasai dan dieksploitasi. Dikotomi semacam itu menjadi fokus koreksi Negri dan Hardt, bersama filsuf-filsuf Perancis pada dekade terakhir abad ke-20.

Negri dan Hardt bertujuan untuk mengatasi dikotomi subjek-objek. Implikasi lebih lanjut dari tindakan berbagi (*act in common*) adalah menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan, keberagaman tersebut menegaskan paradigma berpikir yang mengakomodasi pandangan dunia afirmatif, sebagaimana diungkapkan oleh Gilles Deleuze (2006, pp. 178–179). Dengan kata lain, kesetaraan mencerminkan adanya perbedaan atau keberagaman identitas atau latar belakang yang membentuk suatu komunitas atau kolektivitas. Keberagaman tersebut tidak disusun berdasarkan peringkat mana yang asli atau palsu, mana yang pribumi atau pendatang, mana yang sejati atau bidat, mana tuan atau 'budak', dan seterusnya. Dengan kata lain, konsep masyarakat yang hendak dibangun melibatkan penolakan terhadap praktik hegemoni yang umumnya terjadi dalam strukturalisasi dan

sistematisasi masyarakat modern. Lebih dari itu, karena mengakomodasi perbedaan tanpa menghapus atau merangking perbedaan, gagasan masyarakat multitude Negri dan Hardt menggugah hati masyarakat modern dengan mengedepankan konsep berbagi daripada 'mengakumulasi'.

Gagasan tentang 'masyarakat multitude' dapat diperluas melalui wacana berbagi dalam masyarakat jejalin antarkultur atau interkulturalitas. Konsep ini sejalan dengan formulasi wacana rhizome oleh Gilles Deleuze dan Guattari Gilles Deleuze (2006, pp. 178–179). Menurut kedua filsuf Perancis ini, esensi bukanlah individualitas tetapi keterjejalan antardiri. Artinya, setiap individu (dalam segala bentuknya) ada dalam keterkoneksian baik yang disadari maupun tidak, yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Dalam keterkoneksian ini, tidak ada lagi dikotomi subjek-objek; tidak lagi hegemoni subjek terhadap Liyan. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa 'subjek' sudah tidak lagi menjadi individualitas yang terisolasi atau terlepas dari interelasi tersebut. Individu menjadi eksis pada dirinya sendiri bukan saat ia terisolasi, tetapi ketika ia saling terkait secara langsung atau tidak langsung dengan yang lainnya.

Inilah esensi dari masyarakat interkultural. Setiap identitas, latar belakang, kepentingan, atau elemen apapun saling terkait dalam berbagai cara. Melalui proses ini, keberagaman menjadi bagian yang melekat dalam setiap 'diri', dan justru karena keberagaman tersebut, setiap 'diri' sejatinya eksis secara saling bergantung. Pada titik ini, konsep berbagi bukanlah sekadar fungsi tambahan, melainkan menjadi kemampuan utama dari masyarakat interkultural, yang mengalami transformasi dari masyarakat tradisional, seperti komunitas etnis di Indonesia, menuju suatu entitas yang dapat menampung dan mengakomodasi beragam identitas atau latar belakang.

Dalam konteks ini, meskipun nuansa modern masih terasa, kita tetap memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana kita ingin menyatakan diri dalam kerangka jejalin antaridentitas tersebut (Maalouf, 2001; Sen, 2006). Namun, alasan eksistensialnya mendorong kita meninggalkan paradigma masyarakat modern yang kapitalistik, di mana setiap individu menjadi eksis sebagai entitas yang berbeda dan sekaligus berbeda bagi yang lainnya. Individu ini membagikan kemampuannya untuk eksis kepada yang lain, sehingga yang lain juga menjadi eksis, dan sebaliknya. Dengan kata lain, masyarakat yang berbasis pada konsep berbagi tidak hanya mengemansipasi individu dan komunitasnya saja, melainkan membuka ruang bagi eksistensi bersama. Kita tidak menjadi bebas untuk diri sendiri semata, melainkan kita eksis untuk saling berbagi kebebasan dengan yang lain. Pada titik inilah, masyarakat interkultural menjadi peluang untuk mencapai kesejahteraan bersama; *commonwealth*.

Tentunya, konsep atau ide masyarakat interkultural bersifat abstrak dan konseptual. Namun, masyarakat modern juga dibangun melalui serangkaian diskursus yang kaya akan konsep. Masyarakat modern tidak dapat dipisahkan dari wacana tentang ego yang mandiri, kemampuan untuk memilih, rasionalitas, dan emansipasi. Masyarakat modern diartikan sebagai realisasi dari *Volkgeist* dan *Zeitgeist* dalam konteks emansipasi dan keselamatan individu. Sehingga, ukuran keberhasilan selalu diukur melalui "emansipasi individu". Dengan analogi tersebut, masyarakat interkultural juga ingin didirikan, sesuai dengan semangat zaman terkini yang dipenuhi dengan gerakan untuk mengakomodasi keberagaman sebagai suatu kenyataan. Hidup pada dirinya sendiri didefinisikan oleh keberagaman dan kemampuan berbagi. Mencoba mengabaikan keberagaman tersebut sering kali berujung pada krisis dan bencana di berbagai bidang.

Artikel ini mengeksplorasi gagasan interkulturalisme dan urgensinya dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Meskipun era modern membawa berkah dengan cita-cita mewujudkan kehidupan yang egaliter, namun di sisi lain, membawa ancaman konflik horizontal. Di konteks Indonesia, situasi ini semakin kompleks dengan adanya keragaman budaya, suku, bahasa, dan agama. Tantangan modernitas berbaur dengan latar belakang kebudayaan. Oleh karena itu, gagasan masyarakat interkultural dapat menjadi solusi untuk mengantisipasi potensi konflik dan perubahan akibat modernitas, serta untuk memitigasi dampak negatif yang mungkin timbul.

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode ini digunakan karena metode ini fokus pada pengamatan kajian yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini bertujuan menghasilkan kajian atas fenomena keragaman di Indonesia secara lebih komprehensif terutama melalui sudut pandang interkulturalitas. Dalam penggunaan metode penelitian kualitatif itu, artikel ini fokus pada pengumpulan data secara literatur atau kajian literatur terhadap berbagai sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi buku dan artikel ilmiah yang terkait dengan topik utama penelitian yaitu karya-karya tentang konsep interkultural. Sementara sumber sekundernya ialah data-data yang mendukung topik utama tadi, seperti data statistik tentang keberagaman di Indonesia dan juga data-data yang mendukung argumentasi keragaman tersebut yang berbentuk laporan, berita di media massa, dan bahkan informasi di media sosial. Penulis melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap sumber primer dan sumber sekunder tadi untuk memperoleh data-data yang mendalam terkait topik konsep interkultural dan relevansinya terhadap keragaman masyarakat Indonesia.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Multikulturalisme dan Interkulturalisme

Cantle (2013) berpendapat bahwa multikulturalisme sama sekali tidak sesuai dengan tatanan global yang baru. Pernyataan Cantle ini konsisten dengan sebagian besar penulis lain yang menjelaskan gagasan interkulturalitas, seperti Bouchard (2013), Wilson (2013), Barrett (2013), Bekemans (2013), dan Bunjes (2013). Beberapa peneliti, seperti Meer dan Modood (2013), percaya bahwa semua ciri-ciri interkulturalisme yang konon berbeda telah ada dalam definisi multikulturalisme. Meer dan Modood menyisakan potensi bahwa interkulturalitas sebagai antitesis multikulturalisme dapat digunakan dengan cara-cara yang tidak selalu diterima oleh semua penganut interkulturalisme. Mereka mengakui bahwa interkulturalisme berusaha untuk menyoroti karakteristik yang baik, seperti mendorong dialog, mengakui identitas yang dinamis, mendukung kebersamaan, dan menentang batasan. Namun menurut Meer dan Modood, multikulturalisme telah memiliki karakteristik tersebut. Bahkan, mereka menganggap multikulturalisme lebih unggul daripada interkulturalisme sebagai orientasi politik yang mampu mengakui bahwa eksistensi sosial terdiri dari individu dan kelompok, dan keduanya sudah terwakili dalam gagasan etis tentang kewarganegaraan.

Nasar Meer (2016) meneliti perbedaan mendasar antara multikulturalisme dan interkulturalisme, namun dalam skala yang lebih besar dan dalam latar yang agak berbeda. Meer membahas perbedaan antara kedua orientasi budaya tersebut tidak hanya dalam konteks peradaban Eropa, tetapi juga masyarakat Barat secara umum. Antara interkulturalisme dan multikulturalisme, ia mengajukan setidaknya empat garis pemisah, antara lain: Pertama, baik interkulturalisme maupun multikulturalisme mengakui realitas nyata keragaman budaya dan melihatnya sebagai sesuatu yang positif, meskipun keduanya memiliki komitmen untuk menyeimbangkan antara keragaman dan kesatuan. Kedua, konsep asimilasi dan keanggotaan serta pandangan kebijakan yang tidak direkonstruksi tentang kewarganegaraan merupakan musuh bersama bagi kedua kelompok tersebut. Ketiga, adanya antipati terhadap pandangan liberalisme formalis (atau deontologis) yang mengabaikan fungsi dan pentingnya budaya dan identitas. Keempat, masing-masing berusaha untuk mendefinisikan ulang parameter perlakuan yang adil dan setara dengan memasukkan heterogenitas budaya.

b. Konsep Masyarakat Interkultural

Di abad ke-21, kaum progresif Eropa harus menjawab tiga masalah: dapatkah orang hidup bersama sebagai orang yang setara? Dapatkah individu hidup berdampingan meskipun ada perbedaan? Dan dapatkah setiap orang tinggal di komunitas mereka sendiri? Ketiga masalah ini secara langsung berkaitan dengan kebahagiaan, keragaman, dan lingkungan. Wilson (2014) menarik

kesimpulan dari pengamatannya terhadap isu-isu ini dalam makalahnya. Wilson menunjukkan bahwa pertanyaan pertama dan ketiga hanya dapat dijawab dengan baik jika tantangan kedua terpenuhi. Dengan kata lain, masyarakat harus dapat hidup dengan saling menghormati di antara keragaman budaya dan identitas primitif untuk memenuhi tuntutan kesejahteraan dan mengelola isu-isu lingkungan. Wilson adalah salah satu penulis yang mengusulkan interkulturalisme sebagai solusi untuk kebutuhan masyarakat Eropa. Studinya mengacu pada Buku Putih Dewan Eropa tentang interaksi antarbudaya, yang berjudul "Hidup bersama dalam martabat yang setara." (Wilson, 2014, p. 112)

Istilah interkultural terdiri dari dua suku kata: inter (yang berarti antara) dan kultur (yang berarti budaya), oleh karena itu dapat diterjemahkan sebagai "antar budaya" (Cantle, 2014). Interkultural juga mengacu pada komunikasi antara individu dari berbagai budaya (ini termasuk ras, etnis, sosial ekonomi, atau campuran dari perbedaan-perbedaan) (Abdallah-Preteille, 2006). Oleh karena itu, interkultural adalah gagasan yang mengintegrasikan dua atau lebih aspek budaya ke dalam tubuh pengetahuan dan pemahaman baru untuk setiap orang atau organisasi yang tertarik pada evolusi peradaban lain. Gagasan interkultural dibagi lagi menjadi beberapa sub bahasan, termasuk komponen ilmu komunikasi yang mendasarkan aplikasinya pada konsep pendekatan interkultural (Zapata-Barrero, 2015). Pendekatan interkulturalitas merupakan salah satu solusi yang diusulkan dalam permasalahan komunikasi antarbudaya, agar manusia dapat terhindar dari generalisasi dan stereotip terhadap budaya luar yang dapat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan mengakibatkan ketertinggalan dalam memahami suatu peradaban, baik secara individu maupun kelompok individu berbudaya yang ingin mengembangkan kebudayaannya. Dalam pendekatan antarbudaya, komunikasi melibatkan hubungan antarmanusia, individu, dan identitas yang mereka bawa. Pendekatan antarbudaya mengutamakan pertemuan antarbudaya untuk menempatkan individu sebagai individu yang unik, bukan membandingkan mereka berdasarkan etnis atau ras (Cantle, 2012).

Interkulturalisme, menurut Bekemans (2008), adalah sebuah pendekatan kebijakan yang menghargai keragaman budaya di dalam sebuah masyarakat. Oleh karena itu, interkulturalisme menunjukkan bahwa masyarakat mampu mengintegrasikan keragaman budaya dalam satu peradaban dalam wilayah yang sama. Selain itu, perbedaan-perbedaan di antara mereka dipandang sebagai aset bersama yang tidak boleh disangkal atau dihancurkan. Selain itu, interkulturalisme menggambarkan dirinya sebagai pendekatan kebijakan yang dinamis yang berpendapat bahwa budaya harus diakui apa adanya, seberagam dan se independen pengelompokan sosial yang ada di dalamnya. Pendekatan ini memupuk dan mendorong interaksi yang sopan dan terbuka antara orang-orang dan kelompok-kelompok dengan asal budaya yang beragam, serta mengakui keunggulan dari berbagai budaya di dalam suatu komunitas dan wilayah tertentu (Chen, 1997). Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan timbal balik dari kontak antarbudaya dengan tetap menghormati keragaman yang ada, yang dapat membantu menumbuhkan toleransi dan pemahaman, menghindari konflik, dan memperkuat kohesi sosial.

Selain itu, interkulturalitas menjadi penting karena adanya patologi dalam bidang budaya, yang terdiri dari persepsi dan pandangan yang dipegang oleh individu yang percaya bahwa budayanya lebih unggul daripada budaya lain, serta tindakan bangga dengan budaya sendiri dan merendahkan budaya lain (Cantle, 2014). Kebiasaan dan cara pandang ini biasa disebut sebagai etnosentrisme. Tumbuhnya etnosentrisme dapat dipengaruhi oleh masalah politik dan keanekaragaman nasional. Gesekan antarbudaya akan disebabkan oleh konflik antara orang-orang yang memiliki tujuan dan motivasi yang berbeda. Karena pada dasarnya, setiap peradaban pasti menginginkan dominasi dan kontrol atas budaya lain.

Menurut Milton Bennett (2013), seseorang dapat beralih dari etnosentrisme ke etnorelativisme. Gambaran tahapan etnosentrisme dimulai dari penyangkalan, pertahanan, dan minimalisasi kemudian pada tahapan etnorelativisme dimulai dengan tahapan penerimaan, adaptasi, dan integrasi. Tahap etnosentrisme mengimplikasikan bahwa "pandangan dunia budaya seseorang merupakan inti dari semua realitas." Pertama-tama, pada tahap penyangkalan, individu menyangkal penyerapan budaya

di dalam diri mereka. Individu yang menyangkal bersifat homogen terhadap budaya lain dan membangun standar nilai masyarakat sesuai dengan keyakinannya sendiri, cara pandang ini berasal dari mentalitas yang dikembangkan dari informasi dan pengalaman masing-masing individu.

Selanjutnya, tahap defensif, yaitu perilaku orang cenderung tetap konsisten dengan cita-cita budaya awal yang mereka terima dan pahami. Perilaku dan perspektif individu tidak mampu mengenali peradaban asing. Hal ini sering kali menebarkan benih-benih egosentrisme dalam diri setiap orang, karena sikap membandingkan budaya sendiri dengan budaya lain dan menganggapnya lebih unggul.

Kemudian, pada tahap minimalisasi, perilaku masyarakat secara keseluruhan dicirikan oleh dua konsep utama: universalisme fisik dan universalisme transenden. Universalisme fisik didasarkan pada premis bahwa semua orang memiliki atribut fisik yang sama. Gambaran biologis secara keseluruhan ini mempengaruhi pola perilaku dan komunikasi antarbudaya. Universalisme Transenden dipandang sebagai perspektif yang komprehensif mengenai keragaman budaya. Memahami kesulitan budaya, parameternya bukan hanya sesuatu yang tampaknya lebih dari sekedar masalah fisik yang mulai mengetuk pintu jiwa, yang lebih banyak menggunakan emosi dalam kehidupan sosial.

Selain itu, pada tahap penerimaan, perilaku masyarakat Surabaya mulai mencerminkan sikap menerima masuknya budaya luar yang mirip dengan budaya sendiri. Seseorang menunjukkan berbagai reaksi, seperti menerima variasi perilaku antara sesama individu dan cita-cita dalam suatu latar budaya.

Selain itu, tahap adaptasi membagi masyarakat dan perilaku individu ke dalam dua cara yang berbeda dalam menyesuaikan diri dengan budaya asing: berempati dan merangkul keragaman. Ketika seseorang dapat secara aktif melihat perbedaan budaya dalam kenyataan dan merangkul keragaman, empati akan muncul. Menurut Soerjono Soekanto (2017), proses adaptasi melibatkan penyesuaian diri terhadap norma-norma dan nilai-nilai budaya yang berbeda dan menggunakan potensi untuk membangun lingkungan dan sistem yang diinginkan. Hal ini dapat dicapai jika setiap orang secara kolektif menyadari pentingnya rasa hormat dan toleransi.

Pada tahap ini, perilaku masyarakat dan individu dicirikan oleh dua konsep utama: penilaian kontekstual dan marjinalitas yang konstruktif. Pola pikir integrasi dicirikan sebagai perpaduan dua peradaban yang berbeda. Esensi penilaian kontekstual dalam kehidupan budaya dapat diartikan dalam berbagai aspek positif yang berkaitan dengan ruang dan waktu, serta konsep marjinalitas konstruktif, yang diartikan sebagai sikap membangun sikap dan perilaku dengan budaya minoritas untuk kepentingan kelompok.

c. Isu interkultural di Indonesia

Perdebatan multikultural di kalangan akademisi dan aktivis di Indonesia tidak sepesat di Eropa. Banyaknya literatur yang tersedia mengenai topik ini sering kali berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, biasanya kita hanya menemukan pembicaraan mengenai multikulturalisme atau dialog antarbudaya saja dalam satu teks. Bahkan istilah "interkulturalisme" pun tidak digunakan secara umum, dengan "interkultural" sebagai istilah pilihan (Liliweri, 2015). Meskipun demikian, wacana multikulturalisme telah mendapatkan tempat dalam komunitas akademis di Indonesia, dengan semua studi kasus dan teknik yang digunakan.

Secara sosiokultural, keragaman masyarakat Indonesia sebanding atau mungkin lebih besar dari negara-negara Eropa. Indonesia terdiri dari 300 suku yang berbicara dalam 200 bahasa yang berbeda dan memiliki populasi sekitar 200 juta jiwa (Wakano, 2020). Selain itu, masyarakat Indonesia juga menganut berbagai macam kepercayaan dan agama, termasuk Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, dan masih banyak lagi. Keragaman ini telah lama menimbulkan berbagai masalah bagi Indonesia, yang terletak dekat dengan negara-negara Eropa. Perselisihan sosial yang didasari oleh identitas yang mendasar merupakan wujud nyata dari masalah heterogenitas bangsa. Bahkan di masa kini, kebencian atas nama identitas diekspresikan melalui politik identitas. Sebelumnya, ada pedoman yang sangat kuat dalam teori politik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Ada dua pilihan

kebijakan alternatif bagi sebuah negara yang menghadapi masalah karena keragaman budaya daerah atau etnis yang berkontribusi pada pembentukan negara: menobatkan budaya satu etnis mayoritas yang dominan sebagai budaya nasional atau mencoba menciptakan budaya yang sama sekali baru dengan terlebih dahulu menghapus budaya yang sudah ada.

Dalam situasi Indonesia, tidak satu pun dari pilihan-pilihan tersebut yang dipilih secara eksplisit, namun kita dapat melihat pemaksaan budaya etnis yang dominan melalui berbagai kebijakan negara. Di sisi lain, Indonesia memiliki sejarah politik kebudayaan yang efektif ketika para pendiri bangsa menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional (Bahasa Indonesia), bukan bahasa Jawa atau Sunda (Intan & Bangun, 2022). Dengan menggunakan ide-ide yang ada dan mengaitkannya dengan lingkungan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep interkulturalisme dalam masyarakat Indonesia tampaknya tepat. Hal ini dikarenakan keberagaman masyarakat Indonesia.

4. Kesimpulan

interkulturalitas lebih dari sekedar komunikasi antara individu dari berbagai budaya seperti ras, etnis, sosial ekonomi, atau campuran dari perbedaan-perbedaan itu. Oleh karena itu, interkultural mengandaikan gagasan yang mengintegrasikan dua atau lebih representasi budaya ke dalam interaksi antar pengetahuan dan pemahaman baru untuk setiap orang atau organisasi yang tertarik pada evolusi peradaban lain. Pendekatan interkulturalitas merupakan salah satu solusi yang diusulkan dalam permasalahan interaksi antarbudaya, agar manusia dapat terhindar dari penyeragaman dan klaim stereotip terhadap budaya lain. Penyeragaman dan klaim stereotip tersebut dapat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Pandangan yang mengeneralisasi budaya-budaya ini dapat mengakibatkan ketertinggalan dalam pemahaman suatu peradaban, baik secara individu maupun kelompok individu berbudaya. Tulisan ini berargumen bahwa gagasan masyarakat interkultural merupakan salah satu kemungkinan untuk mengatasi hegemoni kebudayaan dalam dunia modern. Sementara itu, dalam konteks Indonesia, gagasan masyarakat interkultural juga sangat relevan diterapkan di tengah keragaman tadi. Harapannya, melalui konsep ini, Indonesia terhindar dari ragam konflik dan ancaman disintegrasi.

Daftar Pustaka

- Abdallah-Preteille, M. (2006). Interculturalism as a paradigm for thinking about diversity. *Intercultural Education*, 17(5), 475–483.
- Adorno, T. W. (1973). *Negative dialectics* (Vol. 1). A&C Black.
- Avineri, S. (1974). *Hegel's theory of the modern state*. Cambridge University Press.
- Bekemans, L. (2008). Intercultural dialogue, democracy & active citizenship in Europe. *Undertaking Intercultural Exchange: Joint and Innovative Actions for Participatory Integration*.
- Bennett, M. (2013). *Basic concepts of intercultural communication: Paradigms, principles, and practices*. Hachette UK.
- Cantle, T. (2012). *Interculturalism: The new era of cohesion and diversity*. Springer.
- Cantle, T. (2014). National identity, plurality and interculturalism. *The Political Quarterly*, 85(3), 312–319.
- Chen, G.-M. (1997). *A review of the concept of intercultural sensitivity*. ERIC.
- Deleuze, G. (2006). *Nietzsche and philosophy*. Columbia University Press.
- Deleuze, G., & Guattari, F. (1988). *A thousand plateaus: Capitalism and schizophrenia*. Bloomsbury Publishing.

- Foucault, M. (1994). *Michel Foucault* (Vol. 2). Taylor & Francis.
- Hardt, M., & Negri, A. (2004). *Multitude: War and democracy in the age of empire*. Penguin.
- Intan, B. F., & Bangun, C. (2022). Principled Pluralism and the Prevention of Religious Terrorism in Indonesia. *Religions*, 13(5), 429.
- Johnson, P. (2006). *Habermas: Rescuing the public sphere*. Routledge.
- Liliweri, A. (2015). *Teori-Teori Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Pelangi Aksara.
- Maalouf, A. (2001). *In the name of identity: Violence and the need to belong*. Arcade Publishing.
- Nussbaum, M. (2007). Human rights and human capabilities. In *Harv. Hum. Rts. J.* (Vol. 20). HeinOnline.
- Sen, A. (2006). *Identity and Violence: The Illusion of Destiny*. New York: Norton in Company.
- Sen, A. K. (1997). Human capital and human capability. *World Development*, 25(12), 1959–1961.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar* (1st ed.). Jakarta: PT PT Raja Grafindo Persada.
- Viktorahadi, R. F. B. (2022). Etika Al-Ghazālian dan Titik Temunya dengan Etika Kantian. *Focus*, 3(1), 43–52.
- Wakano, A. (2020). Reproduction of multiculturalism in the development of information and communication technology at islamic higher education institutions in indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(7), 681–695. Retrieved from https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85084699106
- Weber, M. (1992). *The Protestant ethic and the "spirit" of capitalism and other writings*. London and New York: Routledge.
- Wilson, H. F. (2014). The possibilities of tolerance: Intercultural dialogue in a multicultural Europe. *Environment and Planning D: Society and Space*, 32(5), 852–868.
- Zapata-Barrero, R. (2015). Interculturalism: Main hypothesis, theories and strands. In *Interculturalism in cities* (pp. 3–19). Edward Elgar Publishing.

this page intentionally left blank